



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SEMARANG 2022





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SEMARANG 2022

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SEMARANG 2022**

No. Publikasi : 33220.2239
Katalog : 4102004.3322
Ukuran Buku : 18,2 Cm x 25,7 Cm
Jumlah Halaman : xxiv + 96 Halaman

Naskah :
BPS Kabupaten Semarang

Gambar Kulit :
BPS Kabupaten Semarang

Diterbitkan Oleh :
©BPS Kabupaten Semarang

Dicetak Oleh :
Alfaprinting

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Ir. Sri Wiyadi, MM

Editor

Wiwit Santi Wahyuningsih, S.ST, M.Si

Penulis

Wiji Nograho

Cesario Hanif Naufal

Retabulasi

Cesario Hanif Naufal

Infografis

Cesario Hanif Naufal

Desain Sampul dan Tata Letak

Wiji Nograho

Cesario Hanif Naufal

Halaman Kosong

<https://semarang.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Semarang 2022 merupakan publikasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang. Buku ini disusun guna memenuhi kebutuhan data tentang kondisi pembangunan, khususnya terkait bidang sosial dan ekonomi yang sangat erat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Data yang disajikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat, maupun institusi pemerintah dan swasta.

Kami menyadari bahwa publikasi ini belum sempurna. Untuk perbaikan pada masa yang akan datang kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ungaran, Desember 2022

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Semarang**



Ir. Sri Wiyadi, MM

Halaman Kosong

<https://semarangkab.lps.go.id>

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Istilah Teknis	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sumber Data dan Sistematika Penyajian	4
BAB II KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
2.1. Letak Geografis	9
2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	11
2.3. Komposisi Penduduk	12
2.3.1. Komposisi Menurut Umur dan Jenis Kelamin	12
2.3.2. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	13
2.4. Perkawinan	15
2.4.1. Status Perkawinan	15
2.4.2. Umur Perkawinan Pertama	16
2.5. Keluarga Berencana	17

BAB III PENDIDIKAN

3.1. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	22
3.2. Angka Melek Huruf (AMH)	23
3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	25
3.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)	26
3.5. Angka Partisipasi Murni (APM)	26

BAB IV KESEHATAN

4.1. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI).....	31
4.2. Umur Harapan Hidup (UHH)	33
4.3. Angka Kesakitan (Morbiditas)	34
4.4. Penolong Proses Kelahiran Terakhir.....	36
4.5. Lamanya Menyusui	38

BAB V KETENAGAKERJAAN

5.1. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	41
5.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	42
5.3. Tingkat Pengangguran	44
5.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	44
5.3.2. Pekerja Formal dan Informal.....	45
5.4. Lapangan Usaha	46
5.5. Status Pekerjaan	48

BAB VI PERUMAHAN

6.1. Fasilitas Perumahan	53
6.2. Fasilitas Penerangan	57
6.3. Fasilitas Air Minum	57
6.4. Fasilitas Jamban	58

BAB VII POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENGELUARAN

7.1. Pola Pengeluaran Rata-Rata per Kapita.....	66
7.1.1. Pola Pengeluaran Rata-rata per Kapita untuk Makanan.....	67
7.1.2. Pola Pengeluaran Rata-rata per Kapita untuk Non Makanan	69
7.2. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein.....	70

BAB VIII KEMISKINAN

8.1. Kemiskinan Makro.....	75
----------------------------	----

BAB IX INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

9.1. Perkembangan IPM	81
9.2. Perkembangan Komponen IPM.....	82

BAB X PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Halaman Kosong

<https://semarang.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	HALAMAN
Tabel 2.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2020-2022	12
Tabel 2.2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Kabupaten Semarang, 2022	13
Tabel 2.3. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) di Kabupaten Semarang, 2022.....	14
Tabel 2.4. Persentase Perempuan Usia 15 – 49 Tahun Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021	16
Tabel 2.5. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021.....	16
Tabel 2.6. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021	17
Tabel 2.7. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang sedang Digunakan di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021	18
Tabel 3.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Semarang, 2020 - 2021	23

Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca/ Menulis di Kabupaten Semarang, 2021	24
Tabel 3.3.	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2021	25
Tabel 3.4.	Angka Partisipasi Kasar SD, SLTP, SLTA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2021	26
Tabel 3.5.	Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, SLTA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2021	27
Tabel 4.1.	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Semarang, 2017-2021	32
Tabel 4.2.	Perkembangan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Semarang, 2016 -2021	34
Tabel 4.3.	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2017-2021.....	34
Tabel 4.4.	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Jaminan kesehatan di Kabupaten Semarang, 2021	35
Tabel 4.5.	Persentase Baduta Menurut Tempat Melahirkan Terakhir di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021	36
Tabel 4.6.	Persentase Baduta Menurut Penolong Terakhir di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021.....	37

Tabel 4.7.	Persentase Baduta Menurut Berat Bayi saat Lahir di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021.....	37
Tabel 4.8.	Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lamanya Pemberian ASI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2021	38
Tabel 5.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kabupaten Semarang, 2022	41
Tabel 5.2.	TPAK, TPT dan TKK Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2020-2022.....	43
Tabel 5.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Formal dan Informal di Kabupaten Semarang, 2019- 2022.....	46
Tabel 5.4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Semarang, 2022.....	46
Tabel 5.5.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Semarang, 2022.....	49
Tabel 5.6.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Semarang, 2022.....	50

Tabel 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021	53
Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Semarang, 2021.....	54
Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Semarang, 2017-2021	55
Tabel 6.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Semarang, 2017- 2021.....	55
Tabel 6.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021	56
Tabel 6.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021	57
Tabel 6.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021	58
Tabel 6.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Semarang, 2017 - 2021.....	59
Tabel 6.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Semarang, 2017-2021.....	60
Tabel 6.10. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Semarang, 2017- 2021.....	60

Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan di Kabupaten Semarang, 2021 (Rupiah)	67
Tabel 7.2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Komoditi Makanan Menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran di Kabupaten Semarang, 2021 (Rupiah)..	68
Tabel 7.3. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Per bulan Komoditi Non Makanan Menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran, 2021 (Rupiah).....	69
Tabel 7.4. Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari Menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran, 2021 (kkal).....	71
Tabel 7.5. Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran, 2021 (Gram)	72
Tabel 8.1. Indikator Kemiskinan Makro Kabupaten Semarang, 2017-2022.....	77

Halaman Kosong

<https://semarang.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	HALAMAN
Gambar 9.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2011 - 2022	81
Gambar 9.2. Nilai IPM Kabupaten Semarang dan Sekitarnya, Tahun 2022.....	82
Gambar 9.3. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Semarang, 2011-2022 (Tahun).....	84
Gambar 9.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Semarang, 2011 – 2022 (persen).....	86
Gambar 9.5. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Semarang, 2011–2022 (ribu rupiah).....	87

Halaman Kosong

<https://semarang.bps.go.id>

DAFTAR ISTILAH TEKNIS

KEPENDUDUKAN

1. Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk tiap kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka yang digunakan untuk mengukur kecepatan pertambahan penduduk per tahun dalam persen.

3. Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.

4. Rasio Ketergantungan

Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun/anak-anak dan 65 tahun ke atas/lansia) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dikalikan 100.

5. Rata-rata Usia Kawin Pertama

Rata-rata usia seorang wanita pada saat melangsungkan perkawinan yang pertama kali.

6. Partisipasi Keluarga Berencana

Proporsi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS).

7. Kontrasepsi Tetap (Kontap)

Alat/cara KB yang bersifat permanen/tetap, meliputi: MOW, MOP, AKDR/IUD dan Susuk/Implant.

PENDIDIKAN

1. APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

2. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

3. APM (Angka Partisipasi Murni)

Proporsi jumlah anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan.

KESEHATAN

1. Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan sakit.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

3. Umur Harapan Hidup (UHH)

Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

KETENAGAKERJAAN

1. Penduduk Usia Kerja

Jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

2. Bekerja

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan/keuntungan selama paling sedikit 1 jam berturut-turut dalam satu minggu.

3. Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

5. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Rasio jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan 100 persen.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase jumlah penduduk yang menganggur (pengangguran) terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran meliputi penduduk yang sedang:

- mencari pekerjaan atau
- mempersiapkan suatu usaha atau
- merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau
- sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

7. Pekerja Tidak Penuh

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

PERUMAHAN

1. Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap.

2. Dinding Rumah

Sisi luar/batas dari suatu bangunan/penyekat dengan bangunan fisik lain.

3. Atap Rumah

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya.

4. Fasilitas Air Minum

Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau Non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa, mata air dan air hujan.

5. Fasilitas Buang Air Besar

Kemudahan suatu rumah tangga dalam menggunakan jamban.

PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK

1. Konsumsi

Meliputi konsumsi makanan dan bukan makanan.

2. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita

Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

KEMISKINAN

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Halaman Kosong

<https://semarangkab.bps.go.id>

SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. KEPENDUDUKAN DAN
KB

BAB 3. PENDIDIKAN

BAB 4. KESEHATAN

BAB 5. KETENAGAKERJAAN

BAB 6. PERUMAHAN

BAB 7. POLA KONSUMSI &
DISTRIBUSI PENGELUARAN

BAB 8. KEMISKINAN

BAB 9. INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA

BAB 10. PENUTUP



Halaman Kosong

<https://semarangkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas utama dari program-program pembangunan ekonomi suatu daerah. Rakyat yang sejahtera merupakan indikator keberhasilan pengimplementasian dari program-program tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan perencanaan program yang sistematis sehingga dapat terwujud suatu proses bisnis yang efektif dan efisien. Atas dasar tersebut, data statistik semakin dirasa memiliki peran vital khususnya data-data yang memiliki keterkaitan erat dengan isu-isu kesejahteraan rakyat.

Data statistik yang digunakan dalam perencanaan program-program tersebut tentu harus bersifat akurat, obyektif, dan aktual. Tentu sebelumnya data-data tersebut harus diolah dan diinterpretasikan terlebih dahulu dengan menggunakan ilmu statistika guna mendapatkan informasi yang berguna bagi pihak terkait. Informasi inilah yang pada akhirnya digunakan sebagai dasar perencanaan program yang akan diterapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2022 hadir sebagai salah satu media yang berguna untuk memberikan berbagai data dan informasi terkait profil kesejahteraan rakyat yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil dari berbagai proses pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Semarang. Informasi yang disajikan merupakan hasil dari interpretasi data-data terkait yang berasal dari pengukuran

berbagai program pembangunan yang telah dilakukan. Sehingga, dengan mengamati data dan informasi tersebut, diharapkan dapat dilakukan langkah mitigasi dini terhadap program yang harus diprioritaskan, diperbaiki, maupun ditunda pelaksanaannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2022 adalah untuk mengukur keberhasilan dari setiap program yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Semarang. Selain itu, hasil publikasi ini akan dapat digunakan sebagai alat dalam perencanaan berbagai program, alat pemantau dan penilaian kebijakan berbagai program pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Semarang.

Tujuan penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2022 ialah untuk melihat sejauh mana kondisi masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Semarang.

1.3. Sumber Data dan Sistematika Penyajian

Data yang digunakan dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2022 bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2022 yang dilakukan di Kabupaten Semarang. Selain itu, digunakan pula berbagai data pelengkap lainnya yang bersumber dari hasil sensus, survei, atau data sekunder dari instansi lainnya. Penyajian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2022 diuraikan dalam 10 (sepuluh) bab sebagai berikut:

- Bab I** menguraikan tentang Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, serta Sumber Data dan Sistematika Penyajian.
- Bab II** menyajikan tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang mencakup Letak Geografis Kabupaten Semarang, Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk, Komposisi Penduduk, Perkawinan, Umur Perkawinan Pertama, serta Keluarga Berencana.
- Bab III** menjelaskan tentang kondisi Pendidikan di Kabupaten Semarang yang meliputi Partisipasi Sekolah, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni.
- Bab IV** membahas tentang Kesehatan yang mencakup Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup, Angka Kesakitan, Penolong Proses Kelahiran Terakhir, dan Lamanya Menyusui.
- Bab V** menyajikan terkait kondisi Ketenagakerjaan yang meliputi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran, Lapangan Usaha, serta Status Pekerjaan.
- Bab VI** menjelaskan tentang kondisi Perumahan penduduk Kabupaten Semarang yang mencakup Fasilitas Perumahan, Penerangan, Air Minum dan Jamban.

- Bab VII** membahas terkait Pola Konsumsi dan Distribusi Pengeluaran yang mencakup Pola Pengeluaran untuk subkelompok makanan dan bukan makanan serta Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein.
- Bab VIII** membahas tentang Kemiskinan yang mencakup Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin.
- Bab IX** membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia yang meliputi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia
- Bab X** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB

2

KEPENDUDUKAN DAN KB



Jumlah penduduk di Kabupaten Semarang hasil SP2020 adalah 1.053.094 jiwa



Sex Rasio sebesar 99,44%



54,50% Perempuan usia 15-49 tahun sedang menggunakan alat KB



69,69% Perempuan usia 15-49 tahun berstatus menikah

Halaman Kosong

<https://semarangkab.go.id>

BAB II

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Letak Geografis

Sebelum membahas lebih jauh tentang capaian pembangunan di bidang sosial dan ekonomi, perlu kita ketahui posisi geografis Kabupaten Semarang. Hal ini dikarenakan letak geografis, ataupun topografi sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah.

Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 1.019,27 km².

Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 544,21 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Kecamatan yang berlokasi pada dataran tinggi yaitu Kecamatan Getasan, Sumowono, dan Bandungan sedangkan Kecamatan Bancak terletak pada wilayah dengan ketinggian rendah.

Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 8 kabupaten/kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening.

Batas Wilayah:

- Sebelah Utara : Kota Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Boyolali

- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Magelang

Luas wilayah Kabupaten Semarang seluruhnya kurang lebih 1.019,27 km², yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 78,35 km² (8,25 %) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 28,22 km² (2,97 %).

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl hingga 1.450 dpl. Tercatat terdapat peningkatan dari segi curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Semarang selama dua tahun terakhir dibandingkan tahun 2019. Selama tahun 2019, curah hujan di Kabupaten Semarang adalah 1.343 mm dengan hari hujan adalah 89 hari. Kemudian, pada tahun 2020 terjadi peningkatan curah hujan dan hari hujan, yakni curah hujan meningkat menjadi 2.587 mm serta tercatat terdapat 127 hari hujan selama tahun 2020. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2021 dimana curah hujan meningkat menjadi 3.005 mm sedangkan hari hujan meningkat menjadi 162 hari.

Secara administrasi Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa, 27 kelurahan, 6.704 RT dan 1.633 RW. Ibukota Kabupaten Semarang terletak di Ungaran di mana lokasi kantor pemerintahan berada di wilayah Kecamatan Ungaran Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Timur. Letak Kabupaten Semarang sangat strategis, hal ini menyebabkan Kabupaten Semarang tumbuh dengan

pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang terintegrasi secara regional dengan kota-kota lainnya.

2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk memegang peranan sentral pada pembangunan itu sendiri. Penduduk merupakan sasaran sekaligus pemikir, perencana, dan pelaksana dari berbagai program pembangunan. Atas dasar pemikiran ini pembangunan manusia dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan penduduk yang besar hanya akan menjadi aset pembangunan ketika kualitas SDM nya cukup baik.

Perubahan sosial (*social change*) penduduk yang terjadi di Kabupaten Semarang, seperti juga di wilayah lain pada umumnya, dikarenakan semakin kecilnya jumlah kelahiran akibat kekhawatiran akan besarnya biaya hidup yang dianggap semakin susah dipenuhi.

Meskipun laju pertumbuhan sudah cukup rendah, masih tetap diperlukan antisipasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam penyediaan berbagai fasilitas pelayanan umum, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan dan perumahan.

Pandemi Covid-19 yang melanda pada awal tahun 2020 telah merubah komposisi penduduk dan juga laju pertumbuhan penduduk. Kabupaten Semarang merupakan tempat tujuan pekerja terutama kawasan industri yang berlokasi di Kecamatan Ungaran, Kecamatan Bergas,

Kecamatan Pringapus. Seperti diketahui pada tahun 2020, terjadi pergerakan penduduk kembali ke wilayah asal dikarenakan adanya kebijakan pengurangan aktivitas ekonomi seperti pengurangan jumlah pekerja, pengurangan shift kerja dan juga banyak pekerja yang dirumahkan. Kondisi ini ternyata berdampak langsung pada komposisi dan jumlah penduduk serta laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang.

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2020-2022

Tahun	Jenis Kelamin			Sex Rasio	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020 ¹⁾	525 064	528 030	1 053 629	99,44%	-
2021 ²⁾	528 326	531 518	1 059 844	99,40%	0,59%
2022 ²⁾	532 529	535 963	1 068 492	99,36%	0,81%

Sumber: 1) Sensus Penduduk 2020

2) Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

2.3. Komposisi Penduduk

2.3.1. Komposisi Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Semarang tahun 2022 sebanyak 1.068.492 jiwa terdiri dari 532.529 jiwa atau 49,84 persen adalah laki-laki dan 535.963 jiwa atau 50,16 persen adalah perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,36.

Situasi kependudukan di suatu wilayah, selain digambarkan melalui laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin, juga dapat tercermin dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, seperti yang disajikan di Tabel 2.2. Penduduk Kabupaten Semarang 2022 tergolong penduduk

muda di mana kelompok umur muda cenderung lebih banyak daripada kelompok lanjut usia.

Tabel 2.2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Kabupaten Semarang, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Jumlah		Rasio Jenis Kelamin (%)
	Laki-laki	%N	Perempuan	%N			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0 – 4	37 808	7,10	36 148	6,74	73 956	6,92	104,59
5 – 9	39 909	7,49	38 821	7,24	78 730	7,37	102,80
10 – 14	40 613	7,63	38 294	7,14	78 907	7,38	106,06
15 – 19	40 875	7,68	39 039	7,28	79 914	7,48	104,70
20 – 24	40 023	7,52	41 263	7,70	81 286	7,61	96,99
25 – 29	40 448	7,60	40 892	7,63	81 340	7,61	98,91
30 – 34	41 402	7,77	41 333	7,71	82 735	7,74	100,17
35 – 39	42 115	7,91	42 179	7,87	84 294	7,89	99,85
40 – 44	40 541	7,61	40 768	7,61	81 309	7,61	99,44
45 – 49	37 485	7,04	38 463	7,18	75 948	7,11	97,46
50 – 54	34 859	6,55	35 965	6,71	70 824	6,63	96,92
55 – 59	29 925	5,62	30 901	5,77	60 826	5,69	96,84
60 – 64	23 230	4,74	25 723	4,80	50 953	4,77	98,08
65 – 69	19 150	3,60	19 978	3,73	39 128	3,66	95,86
70 – 74	11 176	2,10	12 185	2,27	23 361	2,19	91,72
75 +	10 970	2,06	14 011	2,61	24 981	2,34	78,30
Jumlah	532 529	100	535 963	100	1 068 492	100	99,36

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

2.3.2. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan atau rasio antara penduduk usia belum produktif (0 - 14 tahun) dan usia tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk

membayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian sebaliknya.

**Tabel 2.3. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
di Kabupaten Semarang, 2022**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin						Rasio Jenis Kelamin (%)
	Laki-laki	%N	Perempuan	%N	Jumlah	%N	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0 – 14	118 330	22,22	113 263	21,13	231 593	21,67	104,47
15 – 64	372 903	70,02	376 526	70,25	749 429	70,14	99,04
65+	41 296	7,76	46 174	8,62	87 470	8,19	89,44
Jumlah	532 529	100	535 963	100	1 068 492	100	99,36
Rasio Ketergantungan Penduduk Muda	31,73	-	30,08	-	30,90	-	-
Rasio Ketergantungan Penduduk Tua	11,07	-	12,26	-	11,67	-	-
Rasio Ketergantungan Penduduk	42,81	-	42,34	-	42,57	-	-

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Pada tahun 2022, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 42,57 persen, dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) harus menanggung sebanyak 42 sampai 43 orang penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Angka sebesar 42,57 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 30,90 persen, dan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia sebesar 11,67 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2022 penduduk usia produktif di Kabupaten Semarang masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk lanjut usia.

Dari tabel ini juga terlihat ada sebanyak 231.593 orang atau 21,67 persen penduduk yang termasuk kelompok usia belum produktif secara ekonomi (umur 0-14 tahun). Pada kelompok usia 0-14 tahun ini, laki-laki lebih banyak dibanding perempuan sehingga rasio jenis kelaminnya menunjukkan angka lebih dari seratus, tepatnya 104,47.

Untuk penduduk kelompok umur produktif yakni yang berumur 15 - 64 tahun sebanyak 749.429 orang atau 70,14 persen dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,04. Sedangkan penduduk yang dianggap tidak produktif yaitu berumur 65 tahun ke atas ada sebanyak 87.470 orang atau hanya 8,19 persen. Sama halnya dengan kelompok umur 15-64 tahun, pada kelompok penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) ini perempuan lebih banyak dari laki-laki, sehingga rasio jenis kelamin untuk penduduk kelompok umur ini menunjukkan angka kurang dari seratus yakni 89,44.

2.4. Perkawinan

2.4.1. Status Perkawinan

Hasil Susenas 2021 pada tabel 2.4 menunjukkan bahwa 65,19 persen dari perempuan usia 15 - 49 tahun ke atas berstatus kawin, yang berstatus belum kawin sekitar 31,48 persen sedangkan yang berstatus cerai adalah 3,33 persen terdiri dari 2,09 persen cerai hidup dan 1,24 persen cerai mati. Pola status perkawinan selama 2017-2021 cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Tabel 2.4. Persentase Perempuan Usia 15 – 49 Tahun Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Semarang, 2017 – 2021

Status Perkawinan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belum Kawin	25,91	25,88	24,79	26,05	31,48
Kawin	68,82	69,90	69,52	69,69	65,19
Cerai Hidup	2,70	1,86	3,78	2,92	2,09
Cerai Mati	2,57	2,36	1,91	1,34	1,24
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2017-2021

2.4.2. Umur Perkawinan Pertama

Pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu komponen penting yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia dan kebahagiaan keluarga termasuk jugakesehatan ibu. Risiko kematian cenderung tinggi bagi perempuan yang melahirkan pada usia sangat muda. Perkawinan usia muda ikut mempengaruhi tingkat fertilitas karena memperpanjang masa usia produktif.

Tabel 2.5. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Semarang, 2017 – 2021

Tahun	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				Jumlah
	≤16	17–18	19–24	≥ 25	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	14,06	21,99	47,28	16,67	100
2018	13,25	21,51	53,16	12,08	100
2019	14,37	21,82	50,43	10,49	100
2020	15,70	18,78	51,18	14,34	100
2021	13,50	20,99	52,63	12,88	100

Sumber: Susenas 2017-2021

Tabel 2.5 menampilkan persentase perempuan berusia 10 tahun keatas menurut umur perkawinan pertamanya pada tahun 2017 – 2021. Selama

rentang waktu tersebut, usia perkawinan pertama terbanyak konsisten pada usia 19 - 24 tahun.

2.5. Keluarga Berencana

Tabel 2.6. Persentase Perempuan Usia 15 – 49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Semarang, 2017 – 2021

Pemakaian Alat KB	Persentase				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pernah Menggunakan	15,56	11,27	16,20	16,22	15,54
Sedang Menggunakan	59,66	59,42	54,99	54,50	59,70
Tidak Pernah Menggunakan	24,78	29,31	28,81	29,28	24,76
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2017-2021

Dari tabel 2.6. diperoleh informasi bahwa ada 24,76 persen perempuan kawin yang berusia 15 – 49 tahun tidak pernah memakai alat KB. Sekitar 75,24 persen perempuan kawin usia 15 – 49 tahun pernah menggunakan alat KB. Dari mereka yang pernah menggunakan alat kontrasepsi tersebut 59,70 persen diantaranya saat ini masih/sedang aktif menggunakannya dan sisanya 15,54 persen sekarang sedang tidak memakai alat kontrasepsi lagi dengan berbagai alasan.

Alat kontrasepsi yang paling populer digunakan di Kabupaten Semarang adalah suntikan KB. Lebih dari separuh wanita usia subur (WUS) berstatus kawin menggunakan kontrasepsi ini. Dapat dimaklumi, dikarenakan alat kontrasepsi suntik ini cenderung dianggap aman, murah dan tidak perlu setiap hari harus mengingat jadwal pemakaiannya seperti pada pemakaian alat kontrasepsi pil. Posisi kedua diduduki susuk KB yaitu sebanyak 15,93 persen.

Tabel 2.7. Persentase Perempuan Usia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang sedang Digunakan di Kabupaten Semarang, 2017 – 2021

Tahun	Sterilisasi	IUD/ Spiral	Suntikan KB	Susuk KB	Pil KB	Kondom KB	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
2017	6,44	11,29	52,46	16,44	9,73	0,2	3,44
2018	3,89	10,25	57,34	12,51	7,04	3,25	5,72
2019	7,54	8,57	52,81	18,27	7,03	2,76	3,01
2020	6,74	7,30	49,60	15,93	10,42	4,07	4,95
2021	8,46	8,78	49,94	21,49	7,73	1,34	2,26

Sumber: Susenas 2017-2021

Dapat disimpulkan, alat kontrasepsi yang semakin digandrungi adalah kontrasepsi jangka panjang. Sementara untuk kontrasepsi permanen (MOW ataupun MOP) semakin mengalami kenaikan.

BAB III PENDIDIKAN



Angka Partisipasi Sekolah

7-12 Tahun : 99,77 %

13-15 Tahun : 97,47 %

16-18 Tahun : 74,62 %

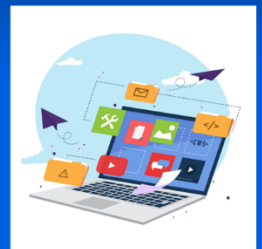


Angka Partisipasi Kasar

SD sederajat : 106,16 %

SMP sederajat : 98,00 %

SMA sederajat: 80,91 %



Angka Partisipasi Murni

SD sederajat : 98,23 %

SMP sederajat : 77,63 %

SMA sederajat: 56,18 %

Halaman Kosong

<https://semarangkabps.go.id>

BAB III

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Sebagai imbasnya, dilaksanakan berbagai program pendidikan dan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mereka yang mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Sebaliknya, mereka yang mempunyai pendapatan rendah, kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dari perspektif sosial ekonomi, tingkat pendidikan seseorang dapat merefleksikan tingkat kesejahteraannya. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin berkualitas pula sumber dayanya.

Pada dasarnya, pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi pendidikan dan tuntutan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak hanya menyelenggarakan sekolah gratis sebagai wujud peningkatan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun, namun juga menyelenggarakan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun) yang telah diterapkan sejak tahun 2013. Sekolah gratis adalah upaya

pemerintah yang membebaskan biaya operasional sekolah di luar biaya individu siswa seperti kebutuhan pribadinya (seragam, tas, peralatan tulis, dan lain-lain). Biaya Operasional Sekolah (BOS) inilah yang menggantikan SPP sehingga siswa tidak dibebankan biaya bulanan.

Selain dana BOS yang disalurkan pemerintah untuk menunjang program tersebut, siswa yang bersangkutan juga menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi siswa tadi. Sebagai bagian dari penyempurnaan BSM, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar. Program ini ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu ini diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan ini baik melalui jalur pendidikan formal mulai SD hingga SMU sederajat maupun melalui jalur pendidikan informal dan nonformal. Dengan demikian, apa yang tertera dalam gagasan dasar Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan bangsa coba untuk diwujudkan secara konsekuen. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur bidang pendidikan diuraikan sebagai berikut:

3.1. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini menggambarkan tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu wilayah sekaligus mencerminkan taraf intelektualitas wilayah yang bersangkutan. Semakin banyak penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi maka semakin tinggi taraf intelektual wilayah tersebut.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Semarang, 2020-2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya Ijazah SD	19,77	24,04	21,96	18,84	22,11	20,51
SD/MI	25,89	21,52	23,65	27,80	26,46	27,12
SMP	21,83	24,85	23,38	22,74	20,92	21,81
SMA/MA/SMK	26,09	22,79	24,40	25,45	22,87	24,12
DI/DII	0,22	0,55	0,39	0,00	0,46	0,24
DIII	1,78	0,95	1,35	0,85	1,26	1,06
DIV/SI dan S2/S3	4,42	5,31	4,87	4,32	5,92	5,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2020-2021

Tabel 3.1. menunjukkan bahwa paling banyak penduduk telah menamatkan sekolah SD/MI sederajat. Sepanjang 2 (dua) tahun terakhir, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD sedikit menurun dari 21,96 persen menjadi 20,51 persen. Untuk yang berpendidikan SD/MI, meningkat dari 23,65 persen menjadi 27,12 persen. Untuk penduduk yang berpendidikan SMP dan SMA/MA/SMK persentasenya cenderung turun. Demikian juga persentase penduduk yang berpendidikan DI/DII dan DIII cenderung menurun. Sedangkan pada pendidikan DIV hingga S3 mengalami kenaikan persentase.

3.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Di era *gadget* ini, kebutuhan untuk bisa membaca dan menulis merupakan keniscayaan. Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), seseorang dikatakan bisa membaca dan menulis adalah jika

seseorang bisa membaca sekaligus menulis, bukan hanya menulis atau membaca saja. Yang dimaksud mampu menulis adalah menulis dalam bentuk dikte, tidak termasuk menulis yang meniru. Begitu pula membaca, yaitu membaca yang karena mengenal hurufnya bukan karena menghafalnya.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca/Menulis di Kabupaten Semarang, 2021

Kemampuan Membaca dan Menulis	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Melek Huruf	97,33	94,52	95,89
Buta Huruf	2,67	5,48	4,11
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2021

Tabel 3.2 menyajikan persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Jumlah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis masih cukup besar yaitu 4 persen dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Angka ini kemungkinan besar disumbang oleh mereka yang generasi lanjut usia di mana pada masanya memang cukup sulit untuk mengenyam pendidikan. Sedikit disumbang pula oleh mereka yang cacat fisik atau mental sehingga sulit mengakses pendidikan dengan normal.

Yang perlu digarisbawahi adalah angka buta huruf perempuan (5,48 persen) yang lebih tinggi dari pada laki-laki (2,67 persen). Pada era 60-70an masih ada perbedaan perlakuan terhadap pendidikan laki-laki dan

perempuan. Hal ini yang diduga mengakibatkan angka buta huruf perempuan jauh lebih tinggi dari pada laki-laki. Dewasa ini, kesadaran terkait pendidikan tanpa membedakan gender sudah semakin baik. Ibu yang merupakan madrasah pertama dan utama bagi anak haruslah mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Bagaimana negara ini akan mencetak generasi istimewa jika pendidikanya di rumah berpendidikan dan berkemampuan biasa-biasa saja. Pendidikan dimaksud tidak hanya sekedar legalitas ijazah tetapi lebih pada wawasan, keilmuan, pengetahuan, terlebih terkait dunia anak dan remaja.

3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	99,55	100,00	99,77
13-15	94,85	100,00	97,47
16-18	75,51	73,62	74,62

Sumber: Susenas 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan gambaran umum untuk melihat partisipasi sekolah sesuai kelompok usia sekolah tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang diduduki. Berdasarkan tabel 3.3., terlihat bahwa persentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah hampir mencapai 100 persen. Kemudian, pada kelompok usia 13-15 tahun masih ada sekitar 2,53 persen penduduk di kelompok tersebut yang tidak sedang bersekolah formal. Angka partisipasi ini semakin mengecil pada kelompok

usia 16-18 tahun dimana sekitar 25,38 persen penduduk usia tersebut tidak berada dalam pendidikan formal.

3.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Kasar SD, SLTP, SLTA menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	106,58	105,71	106,16
SLTP	107,50	88,82	98,00
SLTA	78,90	83,16	80,91

Sumber: Susenas 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara jumlah murid jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, dalam hal ini SD usia 7-12 tahun, SLTP usia 13-15 tahun, dan SLTA usia 16-18 tahun.

APK SD yang mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa jumlah murid di jenjang SD lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia SD (7-12 tahun). Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya anak yang mengenyam pendidikan SD lebih awal (usia 5 atau 6 tahun) ataupun masih duduk di bangku SD meskipun berusia lebih dari 12 tahun karena pernah mengulang kelas (tinggal kelas) atau memang terlambat masuk SD.

3.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Jika APK hanya memberikan gambaran kasar partisipasi sekolah tanpa melihat ketepatan usia sekolah, maka Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan gambaran yang lebih tepat dengan memperhatikan usia sekolah yang sesuai.

Tabel 3.5. Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, SLTA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	98,13	98,33	98,23
SLTP	79,71	75,62	77,63
SLTA	61,97	49,69	56,18

Sumber: Susenas 2021

Berdasarkan tabel 3.5., terlihat bahwa APM pada jenjang SD adalah sebesar 98,23 persen. Hal ini berarti masih terdapat 1,77 persen penduduk usia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SD sederajat. Kemudian, diketahui pula bahwa APM untuk jenjang SLTP adalah sebesar 77,63 persen. Hal ini berarti bahwa hanya seperempat jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SLTP sederajat. Adapun APM pada jenjang SLTA hanya sebesar 56,18 persen. Hal ini berarti bahwa masih cukup banyak penduduk usia 16 – 18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan di jenjang SLTA sederajat. Adanya penurunan APM pada jenjang yang lebih tinggi mengindikasikan rendahnya minat atau kesempatan bagi penduduk di usia yang bersesuaian untuk mengenyam jenjang pendidikan yang seharusnya.

Halaman Kosong

<https://setaraangkab.bps.go.id>

BAB 4

KESEHATAN



Pada tahun 2021, umur harapan hidup di Kabupaten Semarang mencapai 75,79 tahun



Angka Kesakitan di Kabupaten Semarang sebesar 11,95 persen

42,77 Persen Penduduk menggunakan jaminan kesehatan



Halaman Kosong

<https://setaraangkab.bps.go.id>

BAB IV

KESEHATAN

Seperiti tercantum dalam dokumen sasaran pembangunan, bahwa tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ada beberapa indikator di bidang kesehatan untuk melihat capaian Kabupaten Semarang, di antaranya:

4.1. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (*hard rock*), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan, dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan.

Ada 4 (empat) indikator mortalitas bayi yaitu angka kematian *neonatum* (yaitu peluang kematian bayi usia 0 sampai 28 hari pasca dilahirkan), angka kematian *post neonatum* (yaitu angka kematian bayi usia 1 sampai 11 bulan), angka kematian bayi (yaitu peluang kematian bayi usia 0 sampai 11 bulan), dan angka kematian balita (peluang kematian antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun).

Perubahan angka kematian bayi diakibatkan oleh faktor demografis dan sosial-ekonomi. Faktor-faktor demografis yang mempengaruhi angka kematian bayi antara lain adalah jenis kelamin, tempat tinggal, urutan anak, selang kelahiran, dan umur ibu saat melahirkan. Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi angka kematian bayi adalah pendidikan, pekerjaan dan, keadaan perumahan dari ibu yang melahirkan.

Tabel 4.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Tahun	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Balita (AKBA)	Angka Kematian Ibu (AKI)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	5,44	8,80	113,83
2018	7,13	8,38	51,47
2019	7,40	8,20	70,71
2020	8,35	9,04	173,94
2021	8,99	9,82	151,09

Sumber: Diolah dari Data DDA Dinas Kesehatan Kab. Semarang, 2017-2021

Indikator perkembangan angka kematian bayi, balita, dan ibu selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di atas. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2021 sebesar 8,99 bermakna terdapat sekitar 8 sampai 9 bayi meninggal sebelum usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBA) sebesar 9,82 artinya ada sekita 9 sampai 10 bayi meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dari 1000 kelahiran hidup. Selisih kedua angka ini yakni sebesar 0,83 bermakna bahwa terdapat kurang lebih 8 bayi meninggal di rentang usia 1 tahun sampai sebelum genap 5 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Kesimpulannya, usia sebelum 1 tahun merupakan masa-masa yang rawan bagi kehidupan bayi. Tampak jelas bahwa dari AKBA sebesar 9

sampai 10 kematian per 1000 kelahiran hidup, 9 di antaranya meninggal di masa sebelum genap umur 1 tahun. Setelah melewati masa 1 tahun biasanya daya tahan tubuh bayi sudah lebih kuat karena sistem imunnya sudah terbentuk dan mulai bekerja.

Di sisi lain, Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 173,94 pada tahun 2020 menjadi 151,09 pada tahun 2021 setelah mengalami kenaikan selama 2018 dan 2020. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca bersalin (nifas) per 100.000 kelahiran hidup. Berarti, pada tahun 2021 dari 100.000 kelahiran hidup ada 151 ibu meninggal disebabkan proses kehamilan, persalinan ataupun pasca persalinan (nifas). Tentunya angka ini merupakan penyesuaian dengan konstanta 100.000. Namun, jika kita lihat hasil laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang tercatat selama 2021 terjadi kelahiran sebanyak 13.237 kelahiran, dan kematian ibu pada saat hamil, melahirkan dan masa nifas tercatat sebanyak 20 kasus.

4.2. Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu ukuran demografi yang memperlihatkan kondisi kesehatan masyarakat ialah Umur Harapan Hidup (*UHH – Life Expectancy Rate*). UHH adalah lamanya hidup yang dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir (e_0). Usia anak sebelum mencapainya tahun sangat rentan dengan berbagai penyakit, sehingga resiko kematian menjadisemakin tinggi pada usia ini. pengamatan harapan hidup dengan menggunakan alat ukur Umur Harapan Hidup menjadi relevan untuk dilakukan.

**Tabel 4.2. Perkembangan Umur Harapan Hidup
di Kabupaten Semarang, 2016-2021**

Tahun	Umur Harapan Hidup (UHH)
(1)	(2)
2016	75,54
2017	75,57
2018	75,62
2019	75,63
2020	75,73
2021	75,86

Sumber: IPM 2016-2021

*) Metode baru

Umur Harapan Hidup (e_0) tahun 2020 sebesar 75,73 bermakna bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 diharapkan akan hidup mencapai usia 75 tahun hingga 76 tahun.

4.3. Angka Kesakitan (Morbiditas)

Angka kesakitan diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Misalnya ibu rumah tangga yang tidak bisa memasak karena sakit kepala, anak sekolah yang ijin tidak masuk karena demam ataupun balita yang rewel karena batuk pilek.

Tabel 4.3. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	16,00	14,92	17,93	17,14	12,02
Perempuan	15,88	15,95	19,29	17,50	11,88
Jumlah	15,94	15,45	18,62	17,32	11,95

Sumber: Susenas 2017-2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara angka kesakitan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Semarang pada tahun 2021. Jika ditinjau secara keseluruhan, diketahui angka kesakitan di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 adalah

sebesar 11,95 persen. Hal ini berarti bahwa sebanyak 12 dari 100 penduduk di Kabupaten Semarang pernah mengalami gangguan kesehatan yang mengganggu aktivitasnya selama sebulan terakhir.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Semarang, 2021

Jenis Kelamin	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta/Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	29,91	8,72	18,67	1,70	0,82
Perempuan	50,21	25,88	13,09	10,24	0
Jumlah	42,77	20,22	15,14	7,11	0,30

Sumber: Susenas 2021

Ketika sakit, ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Pertama, tidak diobati dan berharap sembuh dengan sendirinya, misalkan untuk penyakit yang dianggap ringan atau sudah biasa seperti batuk, pilek dan demam. Kedua, berobat sendiri yakni membeli obat di apotik tanpa resep dokter, minum jamu untuk pengobatan dan sebagainya. Atau yang ketiga, berobat jalan, bisa ke bidan, dokter, rumah sakit atau ahli kesehatan lainnya. Selanjutnya, ketika berobat jalan, bisa dengan menggunakan jaminan kesehatan atau tanpa jaminan kesehatan.

Berdasarkan hasil Susenas 2021, pasien perempuan lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan daripada laki-laki. Dan dari berbagai jenis jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan PBI merupakan jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan termasuk dalam golongan ini jamkesmas dan KIS

yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan sejenisnya. Selanjutnya BPJS non PBI, diikuti jaminan kesehatan Jamkesda dan jaminan kesehatan swasta.

4.4. Penolong Proses Kelahiran Terakhir

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah penolong kelahiran bayi. Hasil Susenas 2021, seluruh persalinan sudah dilakukan di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik, bidan, praktik dokter, puskesmas ataupun puskesmas pembantu. Hanya sebagian kecil (bahkan tidak ada) persalinan yang dilakukan di rumah maupun lainnya.

Tabel 4.5. Persentase Baduta Menurut Tempat Melahirkan Terakhir di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Penolong Kelahiran	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RS/RS					
Bersalin/Klinik/Bidan/ Praktik dokter	83,17	73,75	86,86	85,73	87,90
Puskesmas/Polindes/Pustu	16,83	22,18	13,14	12,00	11,25
Rumah	0	2,81	0	2,27	0,85
Lainnya	0	1,26	0	0	0
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2017-2021

Sejalan dengan tempat persalinan, secara statistik seluruh persalinan selama 2017 –2021 ditolong oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter kandungan, dokter umum ataupun bidan. Menilik dua indikator ini, dapat dikatakan kesadaran masyarakat Kabupaten Semarang untuk melakukan persalinan yang aman sudah tinggi disertai ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada. Namun demikian, pada tahun 2021

berdasarkan hasil Susenas 2021 masih terdapat kelahiran dengan penolong kelahiran terakhirnya ditangani perawat dan dukun.

Tabel 4.6. Persentase Baduta Menurut Penolong Terakhir di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Penolong Kelahiran	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokter	47,45	34,72	46,95	47,18	38,93
Bidan	49,45	65,28	53,05	47,42	56,65
Perawat	3,1	0	0	3,74	2,47
Perawat	0	0	0	1,66	1,95
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2017-2021

Tabel 4.7. Persentase Baduta Menurut Berat Bayi saat Lahir di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Berat Bayi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
< 2,5 Kg	10,87	7,56	7,51	8,96	8,80
>= 2,5 Kg	89,13	92,44	92,46	90,45	91,20
Tidak Tahu	0	0	0	0,59	0
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2017-2021

Dari keseluruhan bayi yang lahir, masih ada 8,80 persen bayi yang lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Angka ini menurun dibandingkan tahun 2017 sebelumnya yang sebesar 10,87 persen. Meskipun persentase BBLR sudah cukup rendah, tetap harus diwaspadai untuk tahun-tahun berikutnya terutama persalinan di kawasan pedesaan.

4.5. Lamanya Menyusui

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat bermanfaat baik untuk ibu maupun bayi. Pemberian ASI akan memenuhi seluruh kebutuhan nutrisinya, meningkatkan daya tahan tubuh serta mempercepat tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI (menyusui) juga merupakan salah satu metode kontrasepsi alami yang aman serta prosesnya praktis dan ekonomis. Selain itu, dalam proses menyusui terjalin kedekatan kasih sayang antara ibu dengan bayinya yang berdampak positif bagi perkembangan mental ibu dan bayi.

Tabel 4.8. Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lamanya Pemberian ASI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2021

Jenis Kelamin	Persentase Baduta Pernah diberi ASI	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	96,07	10,99
Perempuan	97,69	10,07
Jumlah	96,60	10,51

Sumber: Susenas 2021

Anak-anak baduta (bawah dua tahun) hampir seluruhnya pernah diberi ASI. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran pemberian ASI sudah cukup baik. Rata-rata lama pemberian ASI untuk baduta adalah 10,51 bulan (hampir 1 tahun), dengan rata-rata lama pemberian ASI pada baduta perempuan (10,07 bulan) sedikit lebih rendah daripada baduta laki-laki (10,99 bulan). Namun perbedaan ini tidak cukup signifikan.

Angka ini baru setengah dari lama menyusui ideal yakni selama 24 bulan. Perlu upaya lebih untuk meningkatkan angka ini misal dengan cara sosialisasi atau motivasi terkait pentingnya menyusui hingga genap 2 (dua) tahun.

BAB 5

KETENAGAKERJAAN

71,79 % PENDUDUK
KAB SEMARANG
BEKERJA



TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
(TPAK) TAHUN 2022 = 75,42 %

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
(TPT) TAHUN 2022 = 4,81 %



LAKI-LAKI
84,42 %



LAKI-LAKI
6,09 %



PEREMPUAN
66,87 %



PEREMPUAN
3,27 %

Halaman Kosong

<https://semarangkab.bps.go.id>

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Selaras dengan pembangunan yang semakin masif dilakukan, data terkait ketenagakerjaan semakin diperlukan. Data-data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan sekaligus evaluasi di bidang ketenagakerjaan yang meliputi perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta optimalisasi produktivitas tenaga kerja.

5.1. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Berdasarkan definisi baku terkait ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS, status penduduk dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja.

Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kabupaten Semarang, 2022

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Angkatan Kerja	354.673	84,42	295.824	66,87	650.497	75,42
a. Bekerja	333.068	79,28	286.159	64,69	619.227	71,79
b. Pengangguran	21.605	5,14	9.665	2,18	31.270	3,63
2. Bukan Angkatan Kerja	65.471	15,58	146.556	33,13	212.027	24,58
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) (1+ 2)	420.144	100,00	442.380	100,00	862.524	100,00

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2022

Penduduk usia kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Dalam praktiknya, penduduk usia kerja terbagi lagi ke dalam dua kelompok yakni penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja (terdiri atas penduduk yang bekerja dan pengangguran) dan penduduk yang bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga, bersekolah, pensiunan dan lainnya selama seminggu yang lalu.

Pada tahun 2022, total penduduk usia kerja di Kabupaten Semarang ada sebanyak 862.524 orang yang terdiri atas 420.144 orang laki-laki dan 442.380 orang perempuan. Angka ini meningkat 1,44 persen atau sekitar 12.277 orang dari tahun sebelumnya dimana total penduduk usia kerja adalah sebanyak 850.247 orang. Ditinjau berdasarkan jenis kelaminnya, diketahui bahwa angkatan kerja di Kabupaten Semarang didominasi oleh penduduk laki-laki sedangkan penduduk perempuan lebih mendominasi kelompok bukan angkatan kerja.

Salah satu faktor yang menyebabkan perempuan mendominasi kelompok bukan angkatan kerja adalah karena di dalam kelompok tersebut terdapat kategori mengurus rumah tangga. Telah kita ketahui bersama bahwa perempuan relatif lebih banyak melakukan kegiatan mengurus rumah tangga dibanding laki-laki. Di sisi lain, peran laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga dalam hal ekonomi (*bread winner*) sesuai yang terjadi secara umum di negara berkembang. Hal ini yang menyebabkan angkatan kerja didominasi oleh para laki-laki.

5.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Badan Pusat Statistik, Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang aktif bekerja, sedang mencari

pekerjaan, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah angkatan kerja di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan proporsi penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja. Dengan demikian indikator tersebut cukup penting dalam menerangkan kecenderungan penduduk yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 5.2. TPAK, TPT dan TKK Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang, 2020 - 2022

Indikator	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
(1)	(3)	(4)	(4)
TPAK	75,07	74,10	75,42
Laki-Laki	85,50	84,24	84,42
Perempuan	63,29	66,38	66,87
TPT	4,57	5,02	4,81
Laki-Laki	5,61	5,31	6,09
Perempuan	4,26	3,67	3,27
TKK	95,43	94,98	95,19
Laki-Laki	94,69	94,39	93,91
Perempuan	96,33	95,74	96,73

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2022

Berdasarkan hasil Sakernas 2022, besaran TPAK Kabupaten Semarang adalah 75,42 persen. Hal ini berarti pada setiap seratus orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang berdomisili di Kabupaten Semarang, terdapat sekitar 75 sampai 76 orang yang memasuki pasar kerja baik sudah aktif bekerja maupun masih berstatus sebagai pengangguran. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelaminnya, diketahui bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi laki-

laki lebih besar dibanding perempuan dalam hal memasok tenaga kerja guna memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Semarang pada tahun 2022.

5.3. Tingkat Pengangguran

5.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Badan Pusat Statistik, penganggur didefinisikan sebagai penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja namun sedang tidak bekerja atau mencari pekerjaan selama kurun waktu tertentu. Untuk mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang termasuk ke dalam kelompok tersebut, indikator yang umum digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator tersebut menyatakan proporsi penduduk yang menganggur terhadap seluruh angkatan kerja. Tinggi rendahnya indikator ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan rakyat maupun keamanan dan stabilitas regional. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu isu yang terus menjadi perhatian bagi pemerintah tiap tahunnya. Oleh karena itu, informasi mengenai pengangguran merupakan hal yang sangat diperlukan sehingga antisipasi terhadap dampaknya dapat diupayakan secara optimal.

Berdasarkan hasil Sakernas 2022, diketahui bahwa TPT Kabupaten Semarang adalah sebesar 4,81 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 4 hingga 5 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Semarang pada tahun 2022. Pengangguran di sini mencakup penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), dan penduduk yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja. Jika dilihat perkembangannya dibandingkan tahun 2021, diketahui bahwa terjadi penurunan TPT setelah sebelumnya meningkat

dari tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi perlahan mulai membaik pasca pandemi Covid-19 yang mulai melanda sejak akhir tahun 2019 yang lalu.

Tingkat Kesempatan kerja (TKK) merupakan indikator yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan hasil Sakernas 2022, diketahui bahwa TKK Kabupaten Semarang adalah sebesar 95,19 persen. Hal ini berarti bahwa sebanyak 95 dari 100 orang dalam kelompok angkatan kerja di Kabupaten Semarang aktif bekerja. Ditinjau berdasarkan jenis kelaminnya, diketahui bahwa TKK laki-laki lebih rendah daripada TKK perempuan dimana hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengangguran laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa hal ini juga dapat menunjukkan besarnya kelompok bukan angkatan kerja pada perempuan yang tidak masuk dalam kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan pendapatan.

5.3.2. Pekerja Formal dan Informal

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, selebihnya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka pada Agustus 2022 tercatat sekitar 45,76 persen penduduk bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 54,24 persen bekerja pada kegiatan informal. Persentase pekerja formal mengalami penurunan dibanding kondisi setahun yang lalu.

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Formal dan Informal di Kabupaten Semarang, 2019-2022

Kegiatan	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Formal	54,32	47,09	46,84	45,76
Informal	45,68	52,91	53,16	54,24
Jumlah	100	100	100	100

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2022

5.4. Lapangan Usaha

Pengkategorian lapangan usaha ada beberapa versi, yaitu 3 kategori, 5 kategori, 9 kategori ataupun 17 kategori. Pada pembahasan ini difokuskan pada 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor/lapangan usaha menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan usaha pada Agustus 2022, penduduk Kabupaten Semarang paling banyak bekerja di lapangan usaha jasa yaitu sekitar 40,25 persen, diikuti sektor manufaktur sebanyak 38,56 persen dan sektor pertanian sekitar 21,19 persen.

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Semarang, 2022

Kategori	Laki-laki + Perempuan
(1)	(4)
Pertanian	21,19
Manufaktur	38,56
Jasa-Jasa	40,25
Jumlah	100,00

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2022

Sektor manufaktur di Kabupaten Semarang ditopang dengan industri pengolahan yang tersebar di beberapa kecamatan. Diantaranya industri pengolahan garmen, minuman olahan, di Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus yang banyak didirikan pabrik pengolahan. Hasil industri pengolahan ini tidak hanya mensuplai kebutuhan Kabupaten Semarang saja, bahkan beberapa industri pengolahan juga merupakan eksportir yang hasil produksinya dijual ke luar negeri.

Sementara itu sektor jasa-jasa mencakup salah satu unggulan di Kabupaten Semarang, khususnya adalah sektor pariwisata. Di Kabupaten Semarang terdapat dua kecamatan dengan jumlah hotel terbanyak yakni Kecamatan Getasan dengan wisata alamnya dan juga Kecamatan Bandungan dengan wisata alam seperti Candi Gedong Songo yang juga merupakan ikon Kabupaten Semarang.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran struktur sektor ekonomi yakni minimnya sektor pertanian menjadi sektor jasa dan manufaktur. Namun demikian, pada satu sisi ini pertanda baik karena pergeseran sektor ekonomi dominan menuju sektor sekunder dan tersier berarti pula kemajuan suatu wilayah. Namun, di sisi lain, semakin berkurangnya dominasi sektor pertanian tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Pertanian yang merupakan penghasil bahan makanan pokok tentu akan sangat diperlukan keberlangsungannya. Dengan semakin sedikitnya tenaga kerja di sektor ini mengandung 2 (dua) kemungkinan, secara produktivitas tetap bagus namun beralih dari padat karya menjadi padat modal, peralatan menggunakan mesin, dan sebagainya. Mungkin pula berkurangnya tenaga kerja di sektor ini karena tidak adanya ketertarikan dari

anak muda untuk mewarisi sektor tersebut. Pemuda lebih tertarik di sektor-sektor yang kekinian seperti, industri, pariwisata ataupun dunia kreatif.

5.5. Status Pekerjaan

Dalam publikasi ini, informasi data ketenagakerjaan mengenai status pekerjaan dari penduduk yang bekerja dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap / pekerja keluarga / tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap / dibayar, buruh / karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga / tidak dibayar. Namun demikian, terkadang untuk status pekerja bebas dijadikan satu kelompok baik pekerja bebas pertanian maupun pekerja bebas di non pertanian. Berdasarkan informasi yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional di Kabupaten Semarang tahun 2022 menunjukkan hasil bahwa hampir separuh dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Tabel 5.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut

Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Semarang, 2022

Kategori	Laki-laki + Perempuan
(1)	(4)
Berusaha sendiri	23,54
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/ tidak dibayar	11,39
Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	1,78
Buruh/ karyawan/ pegawai	43,98
Pekerja bebas	8,18
Pekerja keluarga/ tidak dibayar	11,13
Jumlah	100,00

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2022

Mengingat dominasinya, maka sangat penting bagi pemerintah untuk memantau setiap perkembangan kelompok ini terutama pada sektor swasta, karena kelompok ini membutuhkan kelangsunganhidup (*survival*), pengembangan (*development*), perlindungan (*protection*) dalam bekerja. Sehingga merupakan suatu tugas pemerintah untuk mengayomi kelompok ini sehingga terhindar dari tindakan sewenang-wenang sang majikan. Adanya undang-undang dan turunannya berupa peraturan daerah yang berkeadilan baik untuk pekerja dan pengusaha merupakan salah satu solusi untuk menjaga kondisi investasi dan perekonomian di Kabupaten Semarang.

Tabel 5.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Semarang, 2022

Kategori	Laki-laki + Perempuan
(1)	(4)
Tidak Punya Ijazah dan SD / MI / SDLB / Paket A dan yang sederajat	41,27
SMP / MTs / SMPLB / Paket B dan yang sederajat	23,42
SMA / MA / SMLB / SMK / Paket C dan yang sederajat	27,20
Diploma I / II / III / DIV / S1 / S2 / S3	8,11
Jumlah	100,00

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2022

Dari seluruh penduduk usia kerja yang bekerja, mayoritas berpendidikan rendah. Hal ini terjadi pada penduduk laki-laki dan perempuan. Pekerja dengan pendidikan rendah dianalogikan dengan pekerja dengan tingkat produktifitas dan daya saing rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga tercipta kebijakan untuk masyarakat agar bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mendapatkan penghidupan lebih baik lagi untuk pembangunan ekonomi dan manusia secara keseluruhan di Kabupaten Semarang.

BAB 6

PERUMAHAN

JENIS ATAP TERLUAS 2021



GENTENG
90,19 %
rumah tangga

SUMBER AIR MINUM UTAMA 2021



SUMUR/ MATA AIR
TERLINDUNGI
45,63 %
rumah tangga

JENIS LANTAI TERLUAS 2021



MARMER/GRANIT
/KERAMIK
84,88 %
rumah tangga

SUMBER PENERANGAN UTAMA 2021



LISTRIK PLN
94,12 %
rumah tangga

JENIS DINDING TERLUAS 2021



TEMBOK
83,72 %
rumah tangga



Halaman Kosong

<https://semarangkab.go.id>

BAB VI

PERUMAHAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi institusi rumah tangga di samping kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makan). Kondisi rumah memiliki korelasi yang erat dengan derajat kesehatan para penghuninya. Rumah yang bersih dan terawat tentu akan membuat penghuninya menjadi nyaman dan tidak mudah sakit. Oleh karena itu, perlu diperhatikan berbagai fasilitas yang ada pada rumah tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fasilitas perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini akan dibahas mengenai fasilitas perumahan, penerangan, air minum, dan jamban.

6.1. Fasilitas Perumahan

Tabel 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Status Kepemilikan Bangunan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)
Milik Sendiri	92,22	90,70	91,27	90,08	88,81
Kontrak/Sewa	3,67	3,38	2,86	4,73	6,86
Bebas Sewa	3,82	5,64	5,57	4,91	4,33
Lainnya*	0,29	0,28	0,30	0,27	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2017-2021

Ket: *Lainnya mencakup rumah dinas, rumah adat dan lainnya.

Membahas kesejahteraan rakyat dari sisi perumahan, yang utama dan pertama adalah tentang status perumahan itu sendiri. Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa 88,81 persen rumah tangga menempati rumah milik

sendiri dan hanya sebagian kecil yang berstatus kontrak/sewa atau dengan nama lain kos. Secara umum kondisi ini tampak bagus. Dengan semakin mudahnya akses kredit perbankan, proses memiliki rumah tentu bukan hal yang sulit. Bank-bank konvensional ataupun bank syariah banyak menawarkan fasilitas kredit perumahan.

Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Semarang, 2021

Tahun	Luas Lantai per Kapita	
	$\leq 7,2 \text{ m}^2$	$>7,2 \text{ m}^2$
(1)	(2)	(3)
2017	2,13	97,87
2018	1,36	98,64
2019	1,06	98,94
2020	2,03	97,97
2021	2,09	97,91

Sumber : Susenas 2017-2021

Tahun 2021, masih ada 2,09 persen rumah tangga yang menghuni bangunan dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 7,2 meter persegi. Angka ini cukup kecil dan patut terus dilakukan perbaikan karena diperkirakan ke depannya luas rumah akan semakin mengecil sebagai akibat lahan yang tersedia semakin terbatas. Pada masa mendatang, perlu dipikirkan langkah kebijakan perumahan yang strategis untuk mengatasi pertumbuhan penduduk versus keterbatasan lahan perumahan.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Tahun	Jenis Atap Terluas				
	Beton	Genteng	Asbes	Seng	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	3,42	90,30	6,28	0,00	0,00
2018	2,54	89,96	7,12	0,27	0,11
2019	1,90	89,57	7,86	0,67	0,00
2020	2,12	88,03	8,05	1,57	0,23
2021	2,16	90,19	6,45	1,11	0,09

Sumber: Susenas 2017-2021

Fasilitas rumah yang tak kalah penting adalah atap, yakni tentang jenis atap yang digunakan, apakah dapat melindungi penghuni dari panas matahari dan hujan, serta apakah cukup sehat untuk dijadikan pelindung rumah bagian atas. Seperti daerah di pulau Jawa pada umumnya, genteng tetap mendominasi di rumah-rumah di Kabupaten Semarang. Ada 90,19 persen rumah tangga yang tinggal di bangunan beratapkan genteng. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang tinggal di bangunan beratap seng, asbes, beton dan lainnya.

Tabel 6.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Tahun	Jenis Lantai Terluas				
	Marmor/ Granit/ Keramik	Parket/ Vinil/ Karpet/ Ubin/ Tegel/ Teraso	Tanah	Semen/ Bata Merah	Lainnya*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	51,80	6,21	11,27	30,72	0,00
2018	53,52	8,49	9,07	27,76	1,36
2019	57,17	6,04	1,34	26,56	8,89
2020	59,32	5,41	9,63	24,47	1,18
2021	54,88	8,52	7,92	26,91	1,77

Sumber: Susenas 2017-2021

Ket: *Lainnya mencakup bambu, tanah dan lainnya.

Saat ini program pemerintah terkait perumahan sangat banyak, diantaranya adalah program 100-0-100 dan sejuta rumah. Program 100-0-100 dikomandani oleh Kemen PUPR yang menargetkan 100 persen air bersih, 0 persen rumah kumuh dan 100 persen sanitasi. Sementara program sejuta rumah menargetkan pengadaan sejuta rumah setiap tahun, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masih banyak program terkait perumahan lainnya termasuk yang dilakukan oleh pihak swasta, LSM ataupun organisasi lainnya.

Fakta lainnya, lebih dari 50 persen rumah tangga tinggal di bangunan yang berlantai marmer/granit atau keramik. Pada tahun 2021 terdapat 7,92 persen penduduk yang tinggal di bangunan dengan lantai tanah. Penggunaan lantai tanah memang sebaiknya ditinggalkan karena tidak sehat. Lantai tanah susah dibersihkan sehingga bisa menyebabkan munculnya koloni bakteri/cacing, saat kemarau akan memunculkan debu yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan ataupun mengotori makanan dan pada musim hujan dapat timbul genangan akibat rembesan air sehingga rumah menjadi lembab.

Tabel 6.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Tahun	Jenis Dinding Terluas			
	Tembok	Kayu/ Batang Kayu	Anyaman Bambu	Lainnya*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	83,77	16,14	0,09	0,00
2018	83,99	15,18	0,56	0,67
2019	84,31	14,18	0,42	1,09
2020	86,70	12,83	0,18	0,29
2021	83,72	16,19	0,09	0,00

Sumber: Susenas 2017-2021

Ket: *Lainnya mencakup bambu dan lainnya.

Kesadaran masyarakat dan berperilaku sehat juga terlihat dari pemakaian dinding rumah. Pemakaian dinding tembok beberapa tahun terakhir semakin meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 83,72 persen. Pemakaian dinding tembok lebih tahan lama dan bahkan bisa dibilang bebas dari pengeroposan, mampu menahan panas sehingga suhu didalam ruangan tetap stabil serta tahan terhadap cuaca.

6.2. Fasilitas Penerangan

Perkembangan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Semarang juga dapat dilihat dari fasilitas penerangan yang dapat dinikmati oleh rumahtangga yang berdomisili di Kabupaten Semarang. Kenyataannya, hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Semarang telah menikmati aliran listrik PLN (Susenas 2017 sampai Susenas 2021).

Tabel 6.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Sumber Penerangan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Listrik PLN	99,85	100	99,84	96,00	94,12
Listrik non PLN	0	0	0	4,00	5,88
Bukan Listrik	0,15	0	0,16	0	0
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2017-2021

6.3. Fasilitas Air Minum

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia, ketiadaan air merupakan suatu bencana bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian besar agar fasilitas air minum yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat serta sesuai dengan standar kesehatan.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Semarang menggunakan sumur/mata air terlindung, air kemasan/isi ulang dan sumur bor/pompa sebagai sumber air minumnya. Hanya 1,47 persen yang menggunakan air minum dari sumur/mata air tidak terlindung.

Tabel 6.7. Persentase RumahTangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Semarang, 2017–2021

Sumber Air Minum	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Air kemasan/ Isi Ulang	11,31	12,08	13,32	14,00	14,91
Leding	16,62	11,50	12,46	11,75	12,94
Sumur Bor/ Pompa	24,08	33,38	29,08	30,70	25,05
Sumur/ Mata Air Terlindung	44,25	37,84	16,76	41,98	45,63
Sumur/ Mata Air Tidak Terlindung	3,74	5,20	0,76	1,57	1,47
Lainnya	0	0	0,16	0	0
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2017–2021

6.4. Fasilitas Jamban

Salah satu program di bidang kesehatan adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), di mana salah satu komponennya adalah penggunaan jamban yang sehat. Penggunaan jamban erat kaitannya dengan upaya pencegahan penularan penyakit. Yang perlu mendapatkan perhatian adaah budaya Buang Air Besar (BAB) sembarangan. BAB sembarangan berimplikasi panjang diantaranya, timbulnya lingkungan yang tidak sehat, mencemari sumber air yang ada di sekitarnya dan mengundang datangnya lalat atau serangga penular penyakit diare, kolera, disentri, *thypus*, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, keracunan dan berbagai penyakit lainnya.

Pada tahun 2021 terdapat 90,65 persen rumah tangga menggunakan jamban sendiri, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 89,10 persen. Di sisi lain, jumlah ini masih perlu ditingkatkan karena idealnya setiap rumah harus memiliki jamban sendiri dalam rangka pola hidup bersih dan sehat. Terlebih masih ada 1,65 persen yang menggunakan jamban lainnya, termasuk jamban umum ataupun tanpa jamban (BAB di sungai atau saluran air). Ke depan masih diperlukan program jambanisasi terutama bagi warga kurang mampu meskipun program ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2016. Harapannya, satu atau dua tahun lagi, sudah tidak ada lagi warga yang melakukan BAB sembarangan, semua sudah menggunakan jamban.

Tabel 6.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sendiri	87,87	87,85	89,10	91,63	90,65
Bersama	5,49	9,16	8,56	6,13	7,70
Lainnya*	6,64	2,99	2,34	2,25	1,65
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2017-2021

Ket: *Lainnya mencakup jamban umum ataupun tanpa fasilitas.

Tabel 6.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Tahun	Jenis Kloset			Jumlah
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/ Cubluk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	97,35	0,84	1,81	100,00
2018	98,24	0,23	1,53	100,00
2019	98,78	0,90	0,23	100,00
2020	99,23	0,30	0,47	100,00
2021	99,53	0,18	0,29	100,00

Sumber : Susenas 2017-2021

Pada tahun 2021 dari keseluruhan rumah tangga yang menggunakan jamban sendiridan bersama, sebagian besar sudah menggunakan kloset leher angsa. Hanya 0,47 persen selain leher angsa.

Tabel 6.10. Persentase RumahTangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Semarang, 2017-2021

Tahun	Tempat Pembuangan Akhir Tinja					Jumlah
	Tangki Septik/ IPAL/ SPAL	Kolam/ Sawah/ Sungai/ Danau/ Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	67,58	5,03	27,39	0,00	0,00	100
2018	79,07	2,54	18,23	0,16	0,00	100
2019	74,57	2,98	22,45	0,00	0,00	100
2020	79,05	3,93	16,96	0,06	0,00	100
2021	80,32	1,26	18,42	0,00	0,00	100

Sumber: Susenas 2017-2021

Dari keseluruhan rumah tangga yang menggunakan kloset leher angsa, sebagian besar membuang limbahnya ke tangki septik/IPAL. Selanjutnya tempat pembuangan akhir tinja lubang tanah sebesar 18,42 persen. Hanya 1,26 persen yang membuang ke selain tangki septik/ IPAL dan

lubang tanah. Meskipun sedikit, namun angka ini cukup mengganggu karena ternyata masih ada rumah tangga yang saluran klosetnya berakhir di kolam, sawah, sungai, kebun dan sebagainya. Dengan kata lain sanitasinya tidak sehat. Pemerintah sudah memiliki program untuk mengatasi masalah ini yaitu program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mana perlu dukungan masyarakat untuk menyuksekannya.

<https://semarangkab.bps.go.id>

Halaman Kosong

<https://semarangkab.go.id>

BAB 7

POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENGELUARAN

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan 2021



40% Terbawah

289.305
Rupiah

40% Tengah

544.908
Rupiah

20% Teratas

960.534
Rupiah



40% Terbawah

214.971
Rupiah

40% Tengah

460.221
Rupiah

20% Teratas

1.526.645
Rupiah



Halaman Kosong

<https://semarangkab.bps.go.id>

BAB VII POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENGELUARAN

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu isu yang terus menjadi fokus pemerintah dan tak pernah absen untuk dibahas baik di tingkat pusat maupun daerah. Semakin sejahtera rakyat di suatu daerah mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah tersebut dalam meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu daerah adalah melalui tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Pendapatan yang rendah akan mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, disebutkan bahwa manusia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya terlebih dahulu (*basic needs*) sebelum beranjak memenuhi kebutuhan lainnya. Pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan, pakaian dan perumahan) menjadi pilihan yang utama. Hal ini menyebabkan sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk kebutuhan primer sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder dan tersier seperti berlibur, membeli barang penunjang hobi, dan lain sebagainya. Adanya keterbatasan penghasilan itu pula yang akan mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Meskipun pendapatan merupakan salah satu indikator yang cukup akurat dalam mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kenyataannya data tersebut cenderung sulit diperoleh. Sebagai alternatifnya, BPS menggunakan variabel pengeluaran rumah tangga sebagai *proxy*

(pendekatan) dari pendapatan. Pengeluaran rumah tangga sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (non-makanan) dimana pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh sedangkan pengeluaran non-makanan hampir tidak terbatas. Semakin besar proporsi pengeluaran untuk non-makanan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut semakin baik. Hal ini sesuai dengan Teori Maslow yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan.

7.1. Pola Pengeluaran Rata-Rata per Kapita

Menurut Badan Pusat Statistik, pengeluaran rata-rata per kapita merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama sebulan yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pengeluaran penduduk dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Menurut pembagian kelompok tersebut, diketahui bahwa 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp504.276,00 per kapita per bulan. Di sisi lain, 20 persen penduduk yang menempati golongan teratas memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp2.487.179,00 per kapita per bulan. Terlihat bahwa ada kesenjangan yang sangat jauh antara kelompok 40 persen terbawah dan 20 persen teratas. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang masih belum merata dimana *gap* antarkelompok pengeluaran tergolong cukup jauh.

Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan di Kabupaten Semarang, 2021 (Rupiah)

Kelompok Barang	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	289.305	544.908	960.534	525.766
Non Makanan	214.971	460.221	1.526.645	575.438
Jumlah	504.276	1.005.129	2.487.179	1.101.203

Sumber: Susenas 2021

Kesenjangan pengeluaran konsumsi dari kelompok terbawah dibandingkan kelompok teratas cukup tinggi. Diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok teratas hampir setara dengan lima kali rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok terbawah. Kemudian, apabila ditinjau berdasarkan jenis pengeluaran, diketahui bahwa konsumsi makanan pada kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah lebih besar dibanding konsumsi non-makanan. Di sisi lain, pada kelompok 20 persen teratas diketahui bahwa konsumsi non-makanan lebih besar dibanding konsumsi makanan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat kesejahteraan ditandai dengan bergesernya pola konsumsi dari makanan menjadi non-makanan.

7.1.1. Pola Pengeluaran Rata-rata per Kapita untuk Makanan

Pada jenis pengeluaran makanan, porsi terbesar untuk ketiga kelompok pengeluaran adalah pada kelompok makanan dan minuman jadi. Pola konsumsi pada kelompok 20 persen teratas tampak berbeda dengan dua kelompok lainnya. Pada kelompok tersebut, pengeluaran untuk makanan

dan minuman jadi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, baik pada kelompok 40 persen terbawah maupun 40 persen menengah justru terjadi penurunan pada pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi. Hal ini berarti terdapat kecenderungan pada golongan teratas untuk membeli makanan dan minuman jadi dibandingkan mengolah bahan makanan sendiri. Faktor pendorongnya antara lain tidak ada waktu, lebih praktis, dan berbagai alasan lainnya.

Tabel 7.2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Komoditi Makanan Menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran di Kabupaten Semarang, 2021 (Rupiah)

Kelompok Konsumsi	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian	42.088	57.311	69.489	53.655
Umbi-umbian	3.073	4.960	10.449	5.302
Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	11.311	21.967	60.016	25.315
Daging	12.518	22.448	43.593	22.705
Telur dan Susu	19.308	29.923	59.228	31.538
Sayur-sayuran	36.359	56.882	82.099	53.713
Kacang-kacangan	14.460	20.846	24.189	18.959
Buah-buahan	11.347	22.305	55.192	24.499
Minyak dan Kelapa	12.344	18.000	24.366	17.010
Bahan Minuman	15.198	25.174	35.030	23.153
Bumbu-bumbuan	9.286	14.348	22.590	13.971
Konsumsi Lainnya	6.178	13.429	16.717	11.185
Makanan dan Minuman Jadi	69.058	160.568	356.338	163.113
Rokok dan Tembakau	26.777	76.747	101.242	61.648
Jumlah Makanan	289.305	544.908	960.534	525.766

Sumber: Susenas 2021

7.1.2. Pola Pengeluaran Rata-rata per Kapita untuk Non Makanan

Seperti halnya konsumsi makanan, pola konsumsi non-makanan pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas merupakan yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Rata-rata pengeluaran non-makanan pada kelompok ini adalah sebesar Rp1.526.645,00 per kapita per bulan dimana porsi terbesar digunakan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sekitar 39,45 persen dari total pengeluaran non-makanan. Besaran pengeluaran non-makanan pada kelompok tersebut hampir mencapai 3,5 kali lipat dari rata-rata pengeluaran pada kelompok 40 persen menengah. Selain itu, diketahui juga bahwa kelompok tersebut merupakan satu-satunya kelompok yang pengeluaran non-makanannya meningkat dibanding tahun sebelumnya di Kabupaten Semarang.

Tabel 7.3. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Per bulan Komoditi Non Makanan Menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran, 2021 (Rupiah)

Kelompok Konsumsi	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	116.680	230.482	602.285	259.326
Aneka Barang dan Jasa	52.057	113.986	411.631	148.754
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	11.045	25.217	65.005	27.506
Barang Tahan Lama	10.073	36.978	273.793	73.593
Pajak, Pungutan dan Asuransi	22.849	41.812	124.479	50.763
Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	2.266	11.746	49.451	15.496
Jumlah Bukan Makanan	214.971	460.221	1.526.645	575.438

Sumber: Susenas 2021

7.2. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein

Selain ditinjau dari segi pengeluaran, rata-rata pengeluaran makanan juga dapat dilihat dari konsumsi kalori dan protein. Untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, konsumsi kalori adalah sebesar 1.704,71 kkal per kapita per hari. Sementara itu, konsumsi protein pada kelompok ini adalah sebesar 44,42 gram per kapita per hari. Baik konsumsi kalori maupun protein terbesar sama-sama berasal dari konsumsi padi-padian yakni sebesar 699,84 kkal per kapita per hari untuk konsumsi kalori dan 16,21 gram per kapita per hari untuk konsumsi protein.

Kemudian, pada kelompok pengeluaran 40 persen menengah konsumsi kalori adalah sebesar 2.115,03 kkal per kapita per hari. Sementara itu, konsumsi protein adalah sebesar 57,75 gram per kapita per hari. Seperti pada kelompok sebelumnya, baik konsumsi kalori maupun protein terbesar pada kelompok ini juga sama-sama berasal dari konsumsi padi-padian yakni sebesar 746,36 kkal per kapita per hari untuk konsumsi kalori dan 17,63 gram per kapita per hari untuk konsumsi protein.

Sementara itu, pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas konsumsi kalori adalah sebesar 2.516,81 kkal per kapita per hari. Sementara itu, konsumsi protein adalah sebesar 75,55 gram per kapita per hari. Konsumsi kalori terbesar berasal dari padi-padian yakni sebesar 717,05 kkal per kapita per hari. Adapun konsumsi protein terbesar berasal dari makanan dan minuman jadi yakni sebesar 23,80 gram per kapita per hari.

Tabel 7.4. Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari Menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran, 2021 (kkal)

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	699,84	746,36	717,05
2. Umbi-umbian	37,80	41,99	48,97
3. Ikan/udang/cumi/kerang	16,30	25,35	47,30
4. Daging	47,68	71,35	102,46
5. Telur dan susu	47,95	61,82	94,84
6. Sayur-sayuran	40,79	47,13	50,08
7. Kacang-kacangan	63,40	76,25	76,33
8. Buah-buahan	36,01	44,46	67,03
9. Minyak dan kelapa	272,90	327,19	366,75
10. Bahan minuman	108,83	144,31	166,84
11. Bumbu-bumbuan	12,88	16,33	18,84
12. Konsumsi lainnya	40,05	68,12	68,66
13. Makanan dan minuman jadi	280,29	444,37	691,66
14. Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00
Jumlah Konsumsi Kalori Kabupaten Semarang	1.704,71	2.115,03	2.516,81

Sumber: Susenas 2021

Tabel 7.5. Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran, 2021 (Gram)

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	16,54	17,63	16,95
2. Umbi-umbian	0,34	0,39	0,56
3. Ikan/udang/cumi/kerang	2,43	4,00	7,74
4. Daging	2,98	4,55	6,41
5. Telur dan susu	2,83	3,60	5,26
6. Sayur-sayuran	2,56	2,84	2,93
7. Kacang-kacangan	6,52	7,76	7,59
8. Buah-buahan	0,35	0,44	0,69
9. Minyak dan kelapa	0,19	0,23	0,31
10. Bahan minuman	0,84	1,05	1,31
11. Bumbu-bumbuan	0,49	0,61	0,73
12. Konsumsi lainnya	0,74	1,24	1,29
13. Makanan dan minuman jadi	7,61	13,41	23,80
14. Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00
Jumlah Konsumsi Protein Kabupaten Semarang	44,42	57,75	75,55

Sumber: Susenas 2021

BAB 8

KEMISKINAN

JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2022



78,60
ribu jiwa

GARIS KEMISKINAN 2022



459.151
rp/kapita/bulan

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) 2022



1,03

INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) 2022



0,22



Halaman Kosong

<https://semarangkabpps.go.id>

BAB VIII

KEMISKINAN

8.1. Kemiskinan Makro

Berbicara kesejahteraan rakyat tidak akan terlepas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap kemiskinan diwujudkan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang diwujudkan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan/sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat nasional, tingkat daerah (khususnya daerah kabupaten/kota), maupun tingkat wilayah kecil komunitas. Oleh karena itu kegiatan pemantauan kemiskinan secara berkelanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanggulangan kemiskinan, baik untuk nasional maupun untuk daerah.

Menurut jenisnya, data kemiskinan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kemiskinan makro (kemiskinan agregat) dan kemiskinan mikro (kemiskinan individu). Data kemiskinan makro pada dasarnya adalah angka estimasi penduduk miskin untuk tingkat nasional maupun daerah (sampai pada tingkat kabupaten/kota). Data kemiskinan makro bersumber dari

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap bulan Maret setiap tahun. Data ini digunakan untuk alokasi anggaran pengentasan kemiskinan menurut daerah dan untuk perbandingan antardaerah.

Namun demikian data kemiskinan makro ini tidak dapat digunakan untuk target sasaran rumah tangga/keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga/keluarga miskin, diperlukan data mikro yang dikumpulkan secara lengkap dari lapangan. Data kemiskinan mikro hingga saat ini bersumber dari pendataan yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali mulai dari Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 2005), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2008), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011), dan yang terbaru Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT 2015). Selanjutnya, hingga saat ini tugas dan wewenang data kemiskinan mikro ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik pemutakhiran maupun pengelolaannya.

Untuk analisa kemiskinan yang lebih dalam dan komprehensif, serta dapat dibandingkan antar wilayah hingga negara digunakanlah data kemiskinan makro. Dalam kemiskinan makro, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari.

Tabel 8.1. Indikator Kemiskinan Makro Kabupaten Semarang, 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	79,70	75,70	73,90	79,88	83,61	78,60
% Penduduk Miskin	7,78	7,29	7,04	7,51	7,82	7,27
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,10	1,51	0,63	0,96	0,95	1,03
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,25	0,45	0,08	0,16	0,18	0,22
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	317.935	341.576	377.674	404.455	416.395	459.151

Sumber: Susenas 2017-2022

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Lima tahun terakhir, kemiskinan absolut mengalami fluktuasi 79,70 (ribu) jiwa pada tahun 2017 menjadi 79,88 (ribu) jiwa pada tahun 2020 dan

menjadi 83,61 (ribu) jiwa pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 tercatat 78,60 (ribu) jiwa termasuk penduduk miskin. Secara persentase pun angka kemiskinan mengalami fluktuasi dari 7,78 persen pada tahun 2017 menjadi 7,27 persen pada tahun 2022. Sebagai catatan, pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat yang sangat besar. Angka kemiskinan pada tahun 2022 ini menempatkan Kabupaten Semarang pada posisi ke 6 (enam) kemiskinan terkecil dilihat dari persentasenya dibandingkan 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Di sisi lain, P1 dan P2 masih belum stabil. P1 (indeks kedalaman kemiskinan) adalah seberapa jauh posisi pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar indeks berarti semakin besar pula selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, berarti pula semakin berat upaya untuk mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan. P2 (indeks keparahan kemiskinan) merupakan jarak pengeluaran antar sesama penduduk miskin. Semakin besar indeks berarti kesenjangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin semakin besar.

Indikator kemiskinan yang patut diwaspadai adalah P1 dan P2. Keduanya masih tidak stabil, cenderung naik turun tidak pasti. Lima tahun terakhir, kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak stabil. Artinya, kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan naik dan turun. Begitupun kesenjangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin, tidak stabil. Hal ini perlu diperhatikan selain sudah kecilnya persentase kemiskinan dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah.

BAB 9

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Umur Harapan Hidup 2022



75,86 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah 2022



8,05 Tahun

Harapan Lama Sekolah 2022



13,04 Tahun

Pengeluaran per Kapita 2022



Rp12.448 ribu



IPM 2022
74.67

Halaman Kosong

<https://semarangkabbps.go.id>

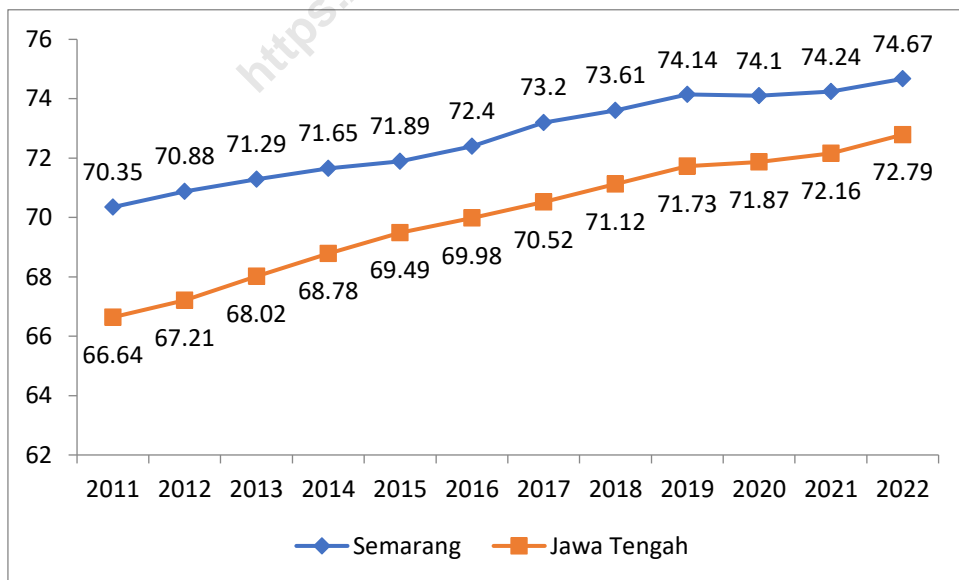
BAB IX

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

9.1. Perkembangan IPM

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Selama kurun waktu 2011 hingga 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kabupaten Semarang setiap tahunnya rata-rata tumbuh 0,54 persen per tahun. Meskipun capaian IPM Kabupaten Semarang berada di atas capaian Jawa Tengah, namun pada kenyataannya pertumbuhan IPM Kabupaten Semarang masih berada di bawah Jawa Tengah yang rata-rata tumbuh sebesar 0,81 persen per tahun.

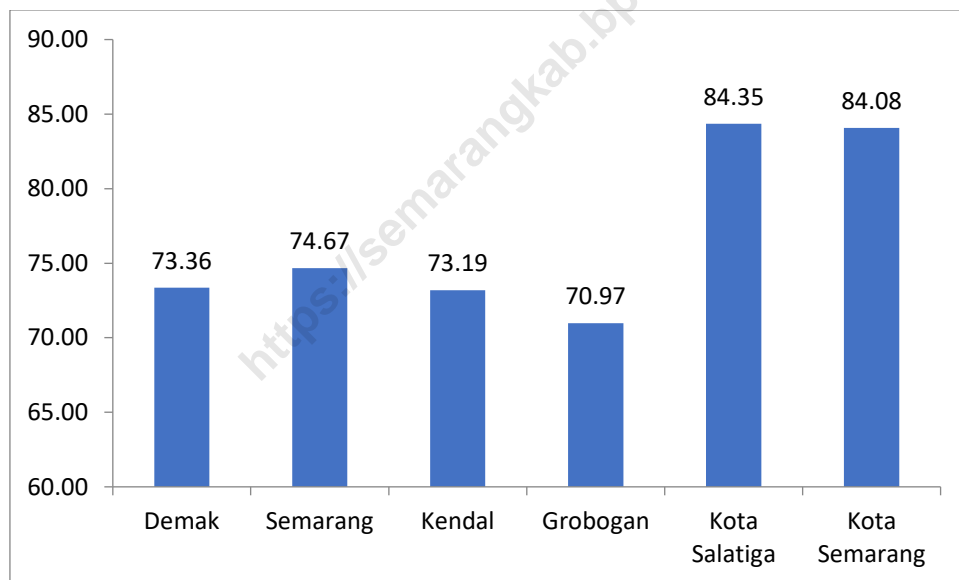
Gambar 9.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2011-2022



Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang tahun 2022 telah mencapai 74,67. Dengan capaian IPM itu, Kabupaten Semarang berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'. Capaian tersebut mengantarkan Kabupaten Semarang pada posisi 12 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, IPM Kabupaten Semarang masih unggul dari Kabupaten Demak, Kendal dan Grobogan. Akan tetapi masih di bawah angka Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Gambar 9.2. Nilai IPM Kabupaten Semarang dan Sekitarnya, Tahun 2022



Sumber: BPS

9.2. Perkembangan Komponen IPM

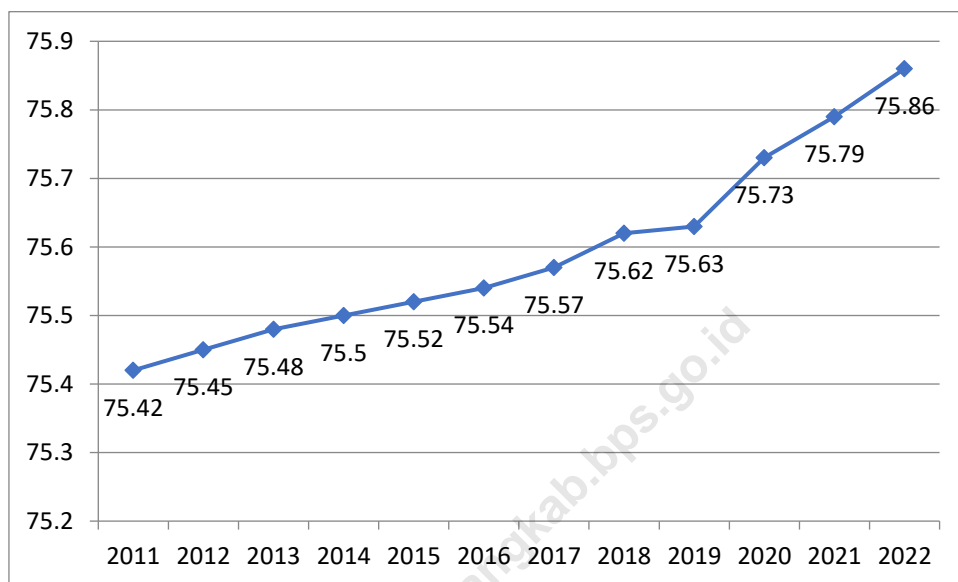
Capaian IPM Kabupaten Semarang pada tahun 2022 merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)

menunjukkan capaian yang bagus. Saat ini, rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 75,86 tahun. Kemudian, untuk dimensi pengetahuan diwakili oleh dua indikator yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

RLS Kabupaten Semarang pada tahun 2022 adalah sebesar 8,05 tahun sehingga bisa dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Jawa Tengah yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,05 tahun atau dengan kata lain telah mampu mengenyam pendidikan sampai kelas VIII (putus sekolah di kelas IX). Meskipun angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan lagi. Di sisi lain, angka HLS Kabupaten Semarang memberikan harapan yang lebih cerah, yaitu mencapai 13,04 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2021 diharapkan mampu bersekolah hingga 13,04 tahun atau setara Diploma I (D-I).

Sementara itu, terdapat peningkatan pada dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Tercatat bahwa pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk Kabupaten Semarang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 12.448.000,00 per tahun atau meningkat Rp 378.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 9.3. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Semarang, 2011-2022 (Tahun)



Sumber: BPS

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang karena memberi kesempatan lebih panjang untuk menikmati kehidupan. Untuk dapat memiliki umur yang lebih panjang tentunya diperlukan kesehatan yang lebih baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator umur harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran derajat kesehatan masyarakat.

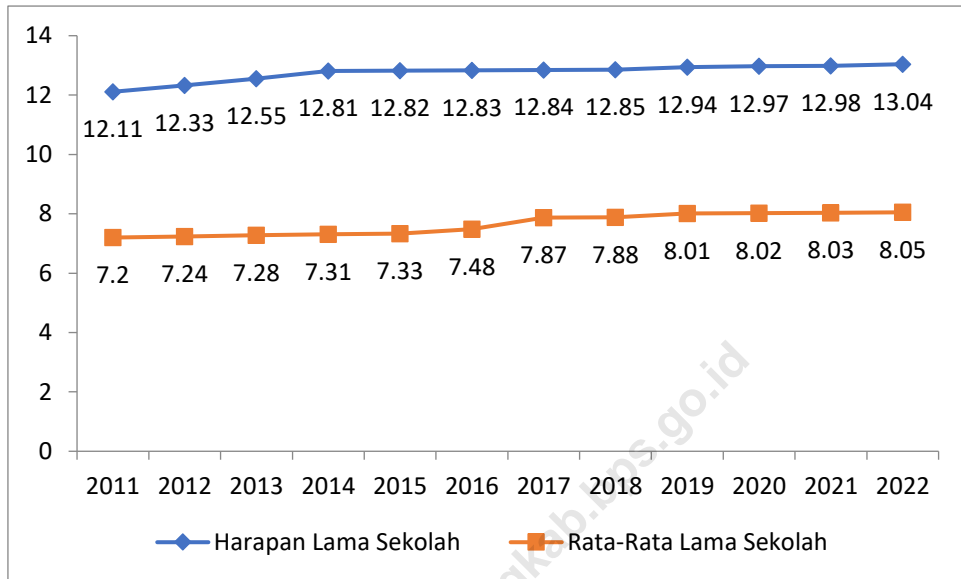
Selama kurun waktu 2011 hingga 2022, umur harapan hidup di Kabupaten Semarang terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Saat ini, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Semarang telah mencapai 75,86 tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Semarang rata-rata tumbuh sebesar 0,05 persen per tahun. Peningkatan UHH selama periode tersebut menunjukkan bahwa derajat

kesehatan di Kabupaten Semarang semakin membaik. Hal itu tentunya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Terdapat ungkapan bijak yang menyatakan bahwa “kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala yang kita miliki tidak berarti apa-apa”. Maka diperlukan kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa peduli pada peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Semarang.

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (*life style*); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Sampai dengan tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Semarang telah mencapai 8,05 tahun atau setara dengan kelas VIII SMP/ sederajat. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,04 tahun atau setara Diploma I (D-I). Selama kurun waktu dua belas tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) terus meningkat meskipun relatif lambat. Secara rata-rata, RLS tumbuh sebesar 1,03 persen per tahun sedangkan HLS tumbuh 0,68 persen tiap tahunnya.

Gambar 9.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Semarang, 2011 – 2022 (persen)



Sumber: BPS

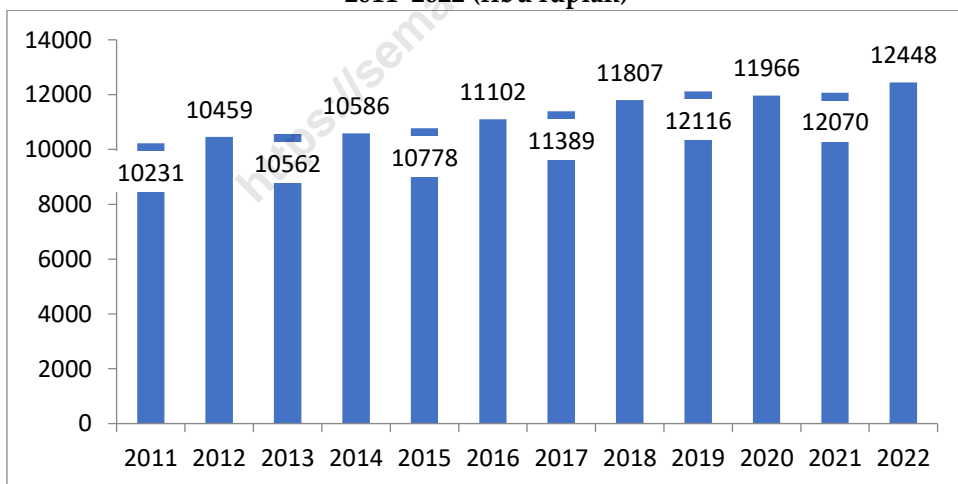
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan RLS dan HLS adalah dengan mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas sehingga bisa memperkecil angka putus sekolah, meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan antar jenjang pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan untuk pembangunan manusia di bidang pendidikan antara lain: Program Indonesia Pintar yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dengan Kartu Indonesia Pintar-nya (KIP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, program revitalisasi fungsi sekolah dengan menerapkan sistem zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta bantuan perbaikan infrastruktur sekolah yang

dikemas dalam bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS.

Pengeluaran penduduk bisa menjadi gambaran tingkat keamanan seseorang. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Semarang tahun 2022 mencapai Rp 12,448 juta per tahun. Tercatat bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang menunjukkan tren positif selama sebelas tahun terakhir dimana penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan karena adanya pandemi COVID-19.

Gambar 9.5. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Semarang, 2011–2022 (ribu rupiah)



Sumber: BPS

Namun demikian kembali pulih pada tahun 2021 walaupun belum sepenuhnya. Pengeluaran per kapita secara rata-rata mengalami pertumbuhan sekitar 1,81 persen per tahun. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita mengalami kontraksi sebesar 1,24 persen, namun kembali naik pada tahun 2021 sebesar 0,87 persen. Hal ini menjelaskan bahwa krisis global dan pandemi COVID-19 memberikan dampak pada perekonomian di Kabupaten Semarang, karena diantara semua komponen IPM, komponen pengeluaran per kapita adalah yang paling rentan terkena dampak atas fenomena global yang seperti krisis moneter dan pandemi COVID-19.

BAB X. PENUTUP

<https://semarangkampus.go.id>

Halaman Kosong

<https://semarangkab.bps.go.id>

BAB X

PENUTUP

Gambaran tingkat kesejahteraan rakyat di Kabupaten Semarang salah satunya dapat dilihat melalui kajian tabel dan analisisnya. Untuk beberapa dimensi Pemerintah Kabupaten Semarang patut berbangga hati atas capaian yang diraih. Dan untuk beberapa dimensi lainnya masih harus bekerja keras agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan sebagai gambaran kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Semarang yaitu:

1. Di bidang kependudukan, tingkat laju pertumbuhan penduduk sudah cukup bagus dan terkendali. Yang patut mendapat perhatian adalah perkawinan usia muda di mana masih ada 13,50 persen perempuan menikah di usia kurang dari 16 tahun (2021).
2. Di bidang pendidikan, cukup banyak tantangan yang harus diselesaikan.
 - a. Masih ada kesenjangan Angka Melek Huruf (AMH) di mana AMH laki-laki (97,33 persen) lebih tinggi dari AMH perempuan (94,52 persen).
 - b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum mencapai 100 persen. Artinya pada usia sekolah yang seharusnya bersekolah, masih ada yang tidak duduk dibangku sekolah. Sedangkan untuk APS 7-12 tahun hampir mencapai 100 persen (99,77) yakni hampir seluruhnya berada pada jenjang pendidikan formal.

3. Di bidang kesehatan
 - a. Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Namun di tahun 2021 untuk indikator ini cenderung stabil untuk AKBA dan untuk AKI cenderung menurun.
 - b. Penolong persalinan terakhir hampir seluruhnya tenaga medis di fasilitas kesehatan.
 - c. Lama menyusui balita 2021 rata-rata selama 10,51 bulan. Angka ini baru setengah dari lama menyusui ideal yaitu selama 24 bulan.
4. Di bidang ketenagakerjaan
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terjadi tren penurunan selama beberapa tahun, namun terjadi kenaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dikarenakan pandemi Covid-19. Sedangkan untuk tahun 2022 kembali mengalami penurunan.
 - b. Dari sisi lapangan usaha, didominasi sektor jasa diikuti sektor manufaktur dan terakhir sektor pertanian.
5. Di bidang perumahan
 - a. Masih ada 9,63 persen rumah tangga yang menempati bangunan berlantai tanah, dan lainnya sedangkan 16,28 persen rumah tangga berdinding selain tembok.
 - b. Masih ada 1,47 persen rumah tangga menggunakan sumber air minum berupa sumur/ mata air tidak terlindung.
6. Masih ada lebih dari 9,35 persen rumah tangga menggunakan jamban bersama ataupun tanpa jamban untuk buang air besarnya.
7. Ada kesenjangan yang cukup menonjol pada golongan 20 persen terkaya. Karenanya, perlu studi lebih lanjut untuk mengetahui siapa

mereka dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan ekonomi.

8. Persentase kemiskinan cukup kecil dan menduduki peringkat ke enam kemiskinan terendah dari 33 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Yang harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih cenderung fluktuatif.
9. IPM Kabupaten Semarang masuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah. IPM Kabupaten Semarang menduduki peringkat ke 12 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Halaman Kosong

<https://semarangkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2022. *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2022*. Berita Resmi Statistik, no. 03/12/3322/Th. III, 9 Desember 2022. Ungaran: BPS Kabupaten Semarang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2021*. Ungaran: BPS Kabupaten Semarang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2022. *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2022*. Ungaran: BPS Kabupaten Semarang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2022. *Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Semarang Tahun 2022*. Berita Resmi Statistik, no. 02/12/3322/Th. III, 18 Desember 2022. Ungaran: BPS Kabupaten Semarang
- Badan Pusat Statistik, 2022. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2022*. Jakarta: BPS

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

Jalan Garuda No 7 Ungaran 50511; Telp/Fax (024) 6921029
Website: semarangkab.bps.go.id; E-mail: bps3322@bps.go.id